

ABSTRAK

Nurlena: Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Nilai Jual Objek Pajak) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Badan Keuangan Daerah yaitu belum dilakukan perubahan Nilai Jual Objek Pajak pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 karena kebijakan dari Bupati Indramayu belum ada kenaikan Tarif Nilai Jual Objek Pajak, belum dilakukan perubahan Nilai Jual Objek Pajak sejak dilimpahkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target yang telah ditetapkan di Badan Keuangan Daerah, untuk mengetahui faktor pendukung dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber yaitu Kabid Pendapatan 2, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Ka. Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan, dan Ka. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerimaan PBB dari tahun 2011 sampai 2016 terealisasi dengan baik bahkan melebihi target yang sudah di tetapkan. Perolehan penerimaan PBB yang di himpun Badan Keuangan Daerah kabupaten Indramayu secara rinci adalah pada tahun 2011 dengan target Rp. 147.236.693.749 terealisasi sebesar Rp. 152.709.097.230 (103%), pada tahun 2012 dengan target Rp. 142.585.809.558 terealisasi sebesar Rp. 144.123.448.818 (101%), pada tahun 2013 dengan target Rp. 129.624.278.000 terealisasi sebesar Rp. 145.825.745.016 (112%).

Pada tahun 2014 dengan target Rp. 27.308.500.000 terealisasi sebesar Rp. 33.257.686.825 (121%), pada tahun 2015 dengan target Rp. 29.308.000.000 terealisasi sebesar Rp. 30.431.756.687 (103%), dan pada tahun 2016 dengan target Rp. 32.382.737.000 terealisasi sebesar Rp. 33.582.056.600 (103%). Namun selain dari Target dan Realisasi yang dirasakan Badan Keuangan Daerah ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan PBB diantaranya yaitu adanya pelimpahan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak ke Badan Keuangan Daerah, pelimpahan tersebut banyak data yang tidak valid contohnya banyak salah nama wajib pajak, salah luas (keberatan) .

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Nilai Jual Objek Pajak)